KAPASITAS KELEMBAGAAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BENGKULU

Ambar Wulandari
NPP. 33.0255
Program Studi Studi Kebijakan Publik
Email: ambarwulandari1704@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Vinda Verina Kartika Dewi Primasari, S.STP, M.Tr.IP
Email: vinda.verina@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *Previous studies on institutional capacity in waste management have primarily focused on metropolitan areas with relatively adequate resources and infrastructure. However, studies examining institutional capacity in waste management policy implementation in non-metropolitan regions such as Bengkulu City remain limited.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the institutional capacity of the Bengkulu City Government in implementing waste management policies.* ***Method:*** *This study employed a qualitative descriptive approach with a post-positivist paradigm. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving officials of the Environmental Agency, field officers, waste bank managers, and community members. Data were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña model.* ***Result:*** *The findings indicate that the institutional capacity of the Bengkulu City Government has been implemented but remains suboptimal. Limitations were identified in the dimensions of human resources, organizational structure, and systems and procedures, particularly regarding personnel, competence, coordination, and infrastructure. Meanwhile, the leadership dimension demonstrated relatively good commitment and coordination despite limited staff development.* ***Conclusion:*** *This study concludes that institutional capacity in waste management policy implementation in Bengkulu City has not yet been optimal. Strengthening human resources, organizational systems, coordination, and supporting infrastructure is necessary to improve the effectiveness of waste management policy implementation.*

Keywords: *Bengkulu City; institutional capacity; policy implementation; waste management.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan berperan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada kota-kota besar dengan kapasitas fiskal dan sarana prasarana yang relatif memadai, sedangkan kajian mengenai kapasitas kelembagaan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di daerah non-metropolitan seperti Kota Bengkulu masih terbatas. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas kelembagaan Pemerintah Kota Bengkulu dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan paradigma post-positivisme. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña dengan fokus pada dimensi sumber daya manusia, struktur organisasi, sistem dan prosedur, serta kepemimpinan. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan Pemerintah Kota Bengkulu dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah telah berjalan namun belum optimal. Pada dimensi sumber daya manusia masih ditemukan keterbatasan jumlah personel dan kompetensi aparatur. Pada dimensi struktur organisasi, koordinasi antarunit belum berjalan optimal. Pada dimensi sistem dan prosedur masih terdapat kendala terkait sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Sementara itu, dimensi kepemimpinan menunjukkan adanya komitmen dan koordinasi yang cukup baik meskipun pembinaan terhadap bawahan belum maksimal. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa kapasitas kelembagaan Pemerintah Kota Bengkulu dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah telah berjalan namun belum optimal.

Kata kunci: implementasi kebijakan; kapasitas kelembagaan; Kota Bengkulu; pengelolaan sampah.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan sampah masih menjadi salah satu isu lingkungan yang penting di Indonesia. Pertumbuhan penduduk, perkembangan wilayah perkotaan, serta meningkatnya aktivitas masyarakat menyebabkan volume sampah terus bertambah setiap tahunnya. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan pengelolaan sampah, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Selain itu, pemerintah juga menetapkan target nasional melalui Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas), yaitu pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025. Namun demikian, berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), timbulan sampah nasional mencapai sekitar 28 juta ton per tahun, sementara sebagian besar sampah tersebut masih belum terkelola secara optimal.

Keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan organisasi pelaksana. Kapasitas kelembagaan mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya manusia, struktur organisasi, sistem dan prosedur, serta kepemimpinan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi yang memiliki kapasitas kelembagaan yang baik akan lebih mampu melaksanakan kebijakan secara efektif dan berkelanjutan.

Kota Bengkulu merupakan salah satu daerah yang masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan sampah. Belum optimalnya capaian pengelolaan sampah serta masih tingginya volume sampah yang belum tertangani menunjukkan adanya permasalahan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kapasitas kelembagaan

pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan masih perlu diperkuat agar tujuan pengelolaan sampah dapat tercapai secara optimal.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan sampah. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada kota-kota besar dengan kapasitas fiskal dan sarana prasarana yang relatif memadai. Sementara itu, penelitian yang mengkaji kapasitas kelembagaan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada daerah non-metropolitan seperti Kota Bengkulu masih terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya research gap yang perlu dikaji lebih lanjut. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas kelembagaan Pemerintah Kota Bengkulu dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu masih menunjukkan berbagai kendala yang menghambat tercapainya target pengelolaan sampah secara optimal. Kondisi tersebut ditandai dengan masih tingginya volume sampah yang belum terkelola, keterbatasan sumber daya manusia, kurang memadainya sarana dan prasarana pengelolaan sampah, serta belum optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas pengelolaan sampah. Padahal, keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan organisasi pelaksana dalam mengelola sumber daya, menjalankan sistem kerja, dan mengoordinasikan berbagai pihak yang terlibat.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas kapasitas kelembagaan dalam konteks pengelolaan sampah maupun pelayanan publik. Penelitian Suryani (2018), Rahmawati (2019), Pratama (2020), Wulandari (2022), dan penelitian lainnya menunjukkan bahwa faktor sumber daya manusia, struktur organisasi, sarana prasarana, koordinasi, serta keterlibatan masyarakat memiliki pengaruh terhadap kapasitas kelembagaan dan keberhasilan implementasi kebijakan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut dilakukan pada daerah dengan karakteristik perkotaan yang relatif maju serta memiliki dukungan sumber daya yang lebih memadai.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sampah, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus menganalisis kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada daerah non-metropolitan seperti Kota Bengkulu. Selain itu, penelitian yang mengkaji kapasitas kelembagaan berdasarkan dimensi sumber daya manusia, struktur organisasi, sistem dan prosedur, serta kepemimpinan dalam konteks pengelolaan sampah di Kota Bengkulu masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan penelitian tersebut dengan menganalisis kapasitas kelembagaan Pemerintah Kota Bengkulu dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai kapasitas kelembagaan Pemerintah Kota Bengkulu dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Kapasitas kelembagaan merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan, khususnya dalam pengelolaan sampah yang melibatkan sumber daya manusia, struktur organisasi, sistem dan prosedur kerja, serta kepemimpinan organisasi. Di tengah meningkatnya volume sampah dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks, pemerintah daerah dituntut memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai agar pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini juga penting bagi pengembangan kajian kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan kapasitas kelembagaan dalam implementasi kebijakan lingkungan. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Bengkulu, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, dalam merumuskan strategi penguatan kapasitas kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah.

Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemerintah daerah dan pemangku kepentingan akan kekurangan informasi empiris mengenai kondisi kapasitas kelembagaan yang sebenarnya dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Akibatnya, upaya perbaikan kebijakan dan penguatan kelembagaan berpotensi tidak tepat sasaran karena tidak didasarkan pada identifikasi masalah dan kebutuhan yang terjadi di lapangan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan berbagai permasalahan pengelolaan sampah tetap berlanjut dan menghambat tercapainya tujuan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sampah dan implementasi kebijakan publik. Suryani (2018), Rahmawati (2019), Pratama (2020), Hidayat (2021), dan Wulandari (2022) mengkaji kapasitas kelembagaan dengan fokus pada sumber daya manusia, struktur organisasi, koordinasi, sarana prasarana, serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pengelolaan sampah. Pada tingkat internasional, penelitian Guerrero, Maas, dan Hogland (2013), Marshall dan Farahbakhsh (2013), Wilson, Velis, dan Cheeseman (2006), Ahsan dkk. (2014), serta Van Meter dan Van Horn (1975) menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan, koordinasi organisasi, dan ketersediaan sumber daya merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan dan pengelolaan sampah.

Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan memiliki peran penting dalam efektivitas implementasi kebijakan. Meskipun demikian, kajian mengenai kapasitas kelembagaan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada daerah non-metropolitan seperti Kota Bengkulu masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kapasitas kelembagaan Pemerintah Kota Bengkulu berdasarkan dimensi sumber daya manusia, struktur organisasi, sistem dan prosedur, serta kepemimpinan.

Secara lebih rinci, penelitian Suryani (2018) menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia dan dukungan sarana prasarana berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan sampah perkotaan. Rahmawati (2019) menemukan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan dapat dilakukan melalui peningkatan kolaborasi antaraktor dan partisipasi masyarakat. Pratama (2020) menegaskan bahwa kapasitas sumber daya manusia dan struktur organisasi menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan program pengelolaan sampah. Hidayat (2021) menunjukkan bahwa koordinasi antarorganisasi memiliki peran strategis dalam implementasi kebijakan lingkungan, sedangkan Wulandari (2022) menemukan bahwa keterbatasan anggaran dan sarana prasarana masih menjadi kendala utama dalam pengelolaan sampah di daerah. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan merupakan faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan penelitian terdahulu karena secara khusus mengkaji kapasitas kelembagaan Pemerintah Kota Bengkulu dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada daerah non-metropolitan yang masih jarang diteliti. Selain itu, penelitian ini menganalisis kapasitas kelembagaan berdasarkan dimensi sumber daya manusia, struktur organisasi, sistem dan prosedur, serta kepemimpinan untuk memperoleh gambaran yang lebih

komprehensif mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas kelembagaan Pemerintah Kota Bengkulu dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan paradigma post-positivisme. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kapasitas kelembagaan Pemerintah Kota Bengkulu dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap pengelolaan sampah di Kota Bengkulu. Informan penelitian terdiri atas PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Pengawas Lapangan, Petugas Lapangan, dan Pengelola Bank Sampah. PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dipilih sebagai informan kunci karena memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu. PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup dipilih sebagai informan kunci karena memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dipilih karena bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis program pengelolaan sampah, sedangkan pengawas lapangan dan petugas lapangan dipilih karena memiliki pengalaman langsung dalam pelaksanaan operasional pengangkutan dan penanganan sampah. Adapun pengelola bank sampah dipilih untuk memperoleh informasi mengenai keterlibatan masyarakat dalam mendukung pengurangan sampah dari sumbernya.

Data yang diperoleh dianalisis secara bertahap melalui proses kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Seluruh data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dibandingkan melalui teknik triangulasi untuk memperoleh data yang kredibel dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk memastikan kredibilitas data yang diperoleh. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian dilaksanakan di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dengan fokus pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Pengumpulan data dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan, yaitu sejak 5 Januari sampai dengan 24 Januari 2025.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis kapasitas kelembagaan Pemerintah Kota Bengkulu dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah menggunakan dimensi kapasitas kelembagaan yang

terdiri atas sumber daya manusia, struktur organisasi, sistem dan prosedur, serta kepemimpinan. Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Kota Bengkulu.

3.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu telah memiliki personel yang melaksanakan tugas pengelolaan sampah, namun jumlah personel yang tersedia masih belum sebanding dengan kebutuhan pelayanan pengelolaan sampah di lapangan. Selain itu, peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan masih perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mampu mengikuti perkembangan kebutuhan pelayanan pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Kondisi tersebut juga diperkuat oleh hasil observasi yang menunjukkan bahwa beban kerja petugas lapangan cukup tinggi dibandingkan dengan jumlah personel yang tersedia. Dengan demikian, dimensi sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah telah berjalan, namun belum optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, diketahui bahwa keterbatasan jumlah personel masih menjadi kendala dalam pengelolaan sampah. Beliau menyampaikan bahwa *"jumlah petugas yang tersedia saat ini masih belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh wilayah pelayanan persampahan di Kota Bengkulu sehingga diperlukan penambahan personel untuk meningkatkan kualitas pelayanan."* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aspek kuantitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Suryani (2018) yang menyatakan bahwa ketersediaan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah. Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Pratama (2020) yang menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah personel dapat memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak hanya ditentukan oleh jumlah personel yang tersedia, tetapi juga oleh kompetensi dan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas pengelolaan sampah. Keterbatasan jumlah petugas menyebabkan beban kerja yang cukup tinggi sehingga berpotensi memengaruhi efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui penambahan personel, pendidikan, dan pelatihan yang berkelanjutan perlu dilakukan agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

3.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi berperan dalam mengatur pembagian tugas, kewenangan, dan koordinasi antarunit kerja dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu telah memiliki struktur organisasi yang jelas sesuai

dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang. Pembagian tugas tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu.

Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa koordinasi antarunit kerja masih menghadapi beberapa kendala sehingga belum seluruh kegiatan pengelolaan sampah dapat berjalan secara optimal. Hasil observasi juga menunjukkan perlunya penguatan koordinasi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan. Oleh karena itu, dimensi struktur organisasi telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan koordinasi antarunit kerja. Temuan ini sejalan dengan Hidayat (2021) yang menegaskan pentingnya koordinasi antarunit organisasi dalam mendukung implementasi kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi yang jelas merupakan modal penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Namun demikian, pembagian tugas yang baik perlu diimbangi dengan koordinasi yang efektif antarunit kerja agar seluruh program dan kegiatan dapat berjalan secara terpadu. Apabila koordinasi belum berjalan optimal, maka potensi terjadinya hambatan komunikasi dan tumpang tindih pelaksanaan tugas akan semakin besar. Oleh karena itu, penguatan koordinasi dan komunikasi antarunit organisasi perlu terus ditingkatkan guna mendukung efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu.

3.3. Sistem dan Prosedur

Sistem dan prosedur merupakan pedoman dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu telah memiliki sistem kerja dan prosedur yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar operasional yang berlaku. Sistem tersebut menjadi dasar pelaksanaan pelayanan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu.

Namun demikian, implementasi sistem dan prosedur masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya armada pengangkut sampah dan fasilitas pendukung lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan hasil observasi lapangan, keterbatasan tersebut memengaruhi efektivitas pelayanan pengelolaan sampah. Dengan demikian, dimensi sistem dan prosedur telah berjalan, tetapi belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan peneliti, masih ditemukan beberapa armada pengangkut sampah yang telah beroperasi dalam jangka waktu cukup lama sehingga memerlukan perawatan berkala. Selain itu, keterbatasan jumlah armada menyebabkan pengangkutan sampah pada beberapa wilayah belum dapat dilakukan secara optimal setiap hari. Kondisi tersebut berdampak pada efektivitas pelayanan persampahan kepada masyarakat. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Wulandari (2022) bahwa keterbatasan sarana dan prasarana masih menjadi hambatan utama pengelolaan sampah di daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, sistem dan prosedur yang telah tersedia menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu telah memiliki pedoman kerja yang jelas. Akan tetapi, keberhasilan penerapan sistem dan prosedur tersebut sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Keterbatasan armada pengangkut sampah dan fasilitas operasional lainnya menyebabkan pelaksanaan pelayanan belum dapat berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, penguatan sistem dan prosedur perlu diikuti dengan peningkatan dukungan sarana dan prasarana agar tujuan kebijakan pengelolaan sampah dapat tercapai secara lebih efektif.

3.4. Kepemimpinan

Kepemimpinan memiliki peran penting dalam mengarahkan organisasi untuk mencapai tujuan kebijakan pengelolaan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pimpinan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu memiliki komitmen dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah melalui koordinasi, pengawasan, dan pemberian arahan kepada bawahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, pimpinan juga berupaya membangun kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung pengelolaan sampah di Kota Bengkulu. Selain itu, pimpinan secara aktif melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Namun demikian, pembinaan dan pengembangan kapasitas pegawai masih perlu ditingkatkan agar kinerja organisasi dapat berjalan lebih optimal. Oleh karena itu, dimensi kepemimpinan menunjukkan kondisi yang relatif lebih baik dibandingkan dimensi lainnya dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu.

Kepemimpinan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan organisasi dalam melaksanakan kebijakan publik. Komitmen pimpinan yang ditunjukkan melalui koordinasi, pengawasan, dan pemberian arahan kepada bawahan memberikan pengaruh positif terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu. Namun demikian, pengembangan kapasitas pegawai melalui pembinaan dan peningkatan kompetensi masih perlu diperkuat agar seluruh sumber daya organisasi mampu bekerja secara optimal. Dengan demikian, kepemimpinan yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai pengarah organisasi, tetapi juga sebagai pendorong peningkatan kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan pada dimensi kapasitas kelembagaan, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu. Faktor penghambat yang ditemukan meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana terutama armada pengangkut sampah, serta belum optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas pengelolaan sampah. Keterbatasan jumlah personel menyebabkan beban kerja petugas lapangan menjadi cukup tinggi, sementara keterbatasan armada berdampak pada efektivitas pelayanan pengangkutan sampah di beberapa wilayah. Selain itu, koordinasi antarunit kerja yang belum optimal turut memengaruhi kelancaran pelaksanaan program pengelolaan sampah.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor pendukung yang berkontribusi terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu. Salah satu faktor pendukung utama adalah komitmen pimpinan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dalam mengarahkan, mengawasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan sampah. Komitmen tersebut terlihat dari upaya pimpinan dalam menjaga koordinasi internal organisasi serta membangun kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung pengelolaan sampah.

Faktor pendukung lainnya adalah keberadaan bank sampah sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengurangan dan pengelolaan sampah, serta dukungan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu. Adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, serta berbagai regulasi daerah memberikan landasan hukum yang jelas bagi pelaksanaan pengelolaan sampah. Dengan demikian, meskipun masih terdapat berbagai kendala, keberadaan faktor-faktor pendukung tersebut menjadi modal penting dalam upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan dan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu.

Temuan mengenai faktor penghambat dan faktor pendukung menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga pada kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi

organisasi, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan kemitraan dengan masyarakat melalui program-program seperti bank sampah. Dengan demikian, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi sumber daya manusia, struktur organisasi, sistem dan prosedur, serta kepemimpinan, dapat diketahui bahwa kapasitas kelembagaan Pemerintah Kota Bengkulu dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah telah berjalan namun belum sepenuhnya optimal. Meskipun terdapat berbagai kendala, keberadaan dukungan regulasi, komitmen pimpinan, serta partisipasi masyarakat melalui bank sampah menjadi modal penting dalam mendukung peningkatan efektivitas pengelolaan sampah di Kota Bengkulu. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan perlu terus dilakukan secara berkelanjutan agar tujuan kebijakan pengelolaan sampah dapat tercapai secara lebih optimal.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kapasitas kelembagaan Pemerintah Kota Bengkulu dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah telah berjalan namun belum optimal. Dimensi kepemimpinan menunjukkan kondisi yang relatif baik, sedangkan dimensi sumber daya manusia, struktur organisasi, serta sistem dan prosedur masih menghadapi berbagai keterbatasan yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi organisasi, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pengelolaan sampah di Kota Bengkulu.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup penelitian yang hanya dilakukan di Kota Bengkulu dengan jumlah informan yang terbatas pada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan sampah. Selain itu, waktu penelitian yang relatif singkat juga membatasi kedalaman penggalian data di lapangan**.**

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat mengkaji kapasitas kelembagaan pengelolaan sampah pada daerah lain dengan karakteristik yang berbeda atau mengembangkan kajian mengenai kolaborasi antaraktor dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu beserta jajarannya yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh informan penelitian, pengelola bank sampah, serta semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan informasi selama proses penelitian hingga penyusunan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Z. (2021). Kapasitas kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat petani penerima sertifikat tanah melalui program kredit usaha tani di Kabupaten Buton. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi*, 7(2), 34–40.

Ahsan, A., Alamgir, M., El-Sergany, M. M., Shams, S., Rowshon, M. K., & Daud, N. N. (2014). Assessment of municipal solid waste management system in a developing country. *Chinese Journal of Engineering*, 2014, 1–11. https://doi.org/10.1155/2014/561935

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Grindle, M. S. (1997). *Getting good government: Capacity building in the public sector in developing countries*. Harvard Institute for International Development.

Guerrero, L. A., Maas, G., & Hogland, W. (2013). Solid waste management challenges for cities in developing countries. *Waste Management, 33*(1), 220–232. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2012.09.008

Hidayat, M. (2021). Kapasitas kelembagaan dalam tata kelola pengelolaan sampah. *Jurnal Governance*, 4(2), 134–145.

KLHK. (2024). *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)*. https://sipsn.menlhk.go.id

Lusthaus, C., Adrien, M.-H., Anderson, G., & Carden, F. (2002). *Organizational assessment: A framework for improving performance*. International Development Research Centre (IDRC).

Marshall, R. E., & Farahbakhsh, K. (2013). Systems approaches to integrated solid waste management in developing countries. *Waste Management, 33*(4), 988–1003. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2012.12.023

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

Pratama, A. (2020). Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(3), 210–220.

Rahmawati, N. (2019). Penguatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(1), 45–55.

Saputra, D. (2022). Analisis kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sampah perkotaan. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(2), 150–160.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Suryani, D. (2018). Kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sampah perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 120–130.

UNDP. (2009). *Capacity development: A UNDP primer*. https://www.undp.org

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society, 6*(4), 445–488. https://doi.org/10.1177/009539977500600404

Wilson, D. C., Velis, C., & Cheeseman, C. (2006). Role of informal sector recycling in waste management in developing countries. *Habitat International, 30*(4), 797–808. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2005.09.005

Wulandari, S. (2022). Kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. *Jurnal Kebijakan Lingkungan*, 10(1), 75–85.